

PROFESIONALISME DAN ETIKA AKUNTAN PUBLIK DALAM MENYIKAPI WINDOW DRESSING Oleh : Asikum Wirataatmadja

Abstract :

Accounting profession into the spotlight, especially since the emergence of corporate scandal in America which lead to the collapse of Enron Corporation and the accounting firm Arthur Anderson's world number one. The U.S. government responded to this situation by issuing Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act or known by the name Sarbones Oxley Act of 2002. In Indonesia the situation is responded to with a variety of efforts to improve the integrity and dignity of public accountants, among others, with increased implementation of the Code of Ethics, continuing education, interviews, and supervision of the government through the Ministry of Finance. Ministry of Finance samp ai in 2004 have examined 45 of Certified Public Accountants and it found various weaknesses in the implementation of the Public Accountants Professional Standards. For it has done 27% warning sanction, sanctions and freezing of license revocation 11% 2%. And is currently being pursued formulating the Law on Certified Public Accountants who are being prepared into the House of Representatives. Degree level and satisfy the high moral ethics and integrity in public accounting will increase the credibility of Certified Public Accountants is concerned, induding public accounting firm where she worked. Being a prestigious professional figure will have an impact on high income for the relevan.

Keywords: *Professionalism and Ethics Public Accountants*

Abstraksi :

Profesi akuntan menjadi sorotan terutama karena munculnya skandal korporasi di Amerika yang bermuara pada kasus Enron Corporation dan runtuhnya kantor akuntan publik nomor satu dunia Arthur Anderson. Pemerintah Amerika merespons situasi ini dengan menerbitkan Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act atau dikenal dengan nama Sarbones Oxley Act 2002. Di Indonesia situasi ini direspons dengan berbagai upaya untuk meningkatkan integritas dan martabat akuntan publik antara lain dengan peningkatan pelaksanaan Kode Etik, pendidikan berkelanjutan, interview, dan pengawasan pemerintah melalui Departemen Keuangan. Departemen Keuangan sampai tahun 2004 telah memeriksa 45 Akuntan Publik dan ternyata ditemukan berbagai kelemahan dalam penerapan Standar Profesional Akuntan Publik. Untuk itu telah dilakukan sanksi peringatan 27%, sanksi pembekuan izin 11% dan pencabutan izin 2%. Dan saat ini sedang diupayakan perumusan UU tentang Akuntan Publik yang sedang dipersiapkan masuk DPR. Tingkat derajat akhlak yang tinggi dan memuaskan dalam etika dan integritas Akuntan Publik akan meningkatkan kredibilitas Akuntan Publik yang bersangkutan, termasuk Kantor Akuntan Publik tempat dia bekerja. Menjadi sosok profesional yang bergengsi akan berdampak pada penghasilan yang tinggi bagi yang bersangkutan

Kata kunci: Profesionalisme dan Etika Akuntan publik

A. PENDAHULUAN

Belakangan ini profesi akuntan menjadi sorotan terutama karena munculnya skandal korporasi di Amerika yang bermula pada kasus Enron Corporation dan runtuhnya kantor akuntan publik nomor satu dunia Arthur Anderson. Pemerintah Amerika merespons situasi ini dengan menerbitkan Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act atau dikenal dengan nama Sarbanes Oxley Act 2002.

Di Indonesia situasi ini direspons dengan berbagai upaya untuk meningkatkan integritas dan martabat akuntan publik antara lain dengan peningkatan pelaksanaan Kode Etik, pendidikan berkelanjutan, peer interview, dan pengaluan pemerintah melalui Departemen Keuangan. Departemen Keuangan sampai tahun 2004 telah memeriksa 45 Akuntan Publik dan ternyata ditemukan berbagai kelemahan dalam penerapan Standar Profesional Akuntan Publik. Untuk itu telah dilakukan sanksi peringatan 27%, sanksi pembekuan izin 11% dan pencabutan izin 2%. Dan saat ini sedang diupayakan perumusan UU tentang Akuntan Publik yang sedang dipersiapkan masuk DPR.

Skandal korporasi ini sudah sering terjadi berdasarkan pengalaman sejarah menunjukkan bahwa manusia dengan segala kemajuan dan perangkat sosial yang dimilikinya sudah didesain untuk menghindari kemungkinan skandal itu. Di negara modern khususnya di dalam Masyarakat Barat yang dikuasai oleh sistem kapitalisme alat pencegahannya adalah adanya kontrak entitas, etika dan kontrak sosial dengan masyarakat. Kontrak sosial ini biasanya diwakili oleh sistem hukum, penegakan hukum, kebiasaan, dan etika dan moralitas. Namun dari berbagai peristiwa sejarah korporasi di Amerika dan sampai pada skandal korporasi belakang ini

dapat kita simpulkan bahwa serapi apapun hukum, penegakan hukum dan etika yang dimiliki ternyata tidak mampu menutup semua kemungkinan skandal atau tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang lainnya.

Berdasarkan data dari Internet Crime Complaint Center (USA) jumlah pengaduan Internet Fraud sejak tahun 2000-2004 adalah sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Complain	Kenaikan
2000	10.428	-
2002	48.252	483%
2004	207.449	1109%

Sumber: Business Week June 6, 2005

Pelanggaran etika menanjak tajam dari tahun 2000 sebanyak 10.482 complain ke tahun 2002 sebanyak 48.252 complain menjadi tahun 2004 sebanyak 207.449 complain kenaikan setiap tahun sangat signifikan yang sudah tentu memerlukan penelitian lebih jauh, apa penyebabnya timbul demikian.

Profesi adalah suatu moral community yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Mereka yang membentuk suatu profesi bersatu karena latar belakang pendidikan yang sama dan bersama-sama memiliki keahlian yang tertutup bagi orang lain di luar profesinya. Dengan demikian profesi menjadi suatu kelompok yang mempunyai kekuasaan tersendiri dan karena itu mempunyai tanggung jawab khusus. Supaya dapat berfungsi dengan semestinya, syarat mutlak harus diperhatikan:

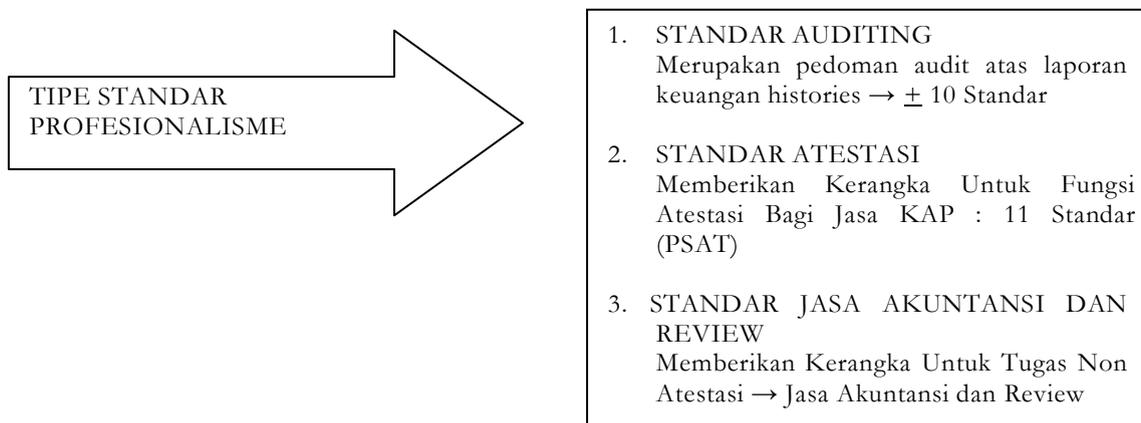
1. Bahwa kode etik itu dibuat oleh profesi sendiri (*self regulation*). Dengan membuat kode etik, profesi sendiri akan menetapkan hitam atau putih niatnya untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakiki. Hal itu tidak pernah biasa dipaksakan dari luar. Hanya kode etik

yang berisikan nilai-nilai dan cita-cita yang diterima oleh profesi itu sendiri biasa mendarah daging dengannya dan menjadi tumpuan harapan untuk dilaksanakan juga dengan tekun dan konsekuen.

- Syarat lainnya yang harus dipenuhi adalah pelaksanaannya dialuasi terus menerus.

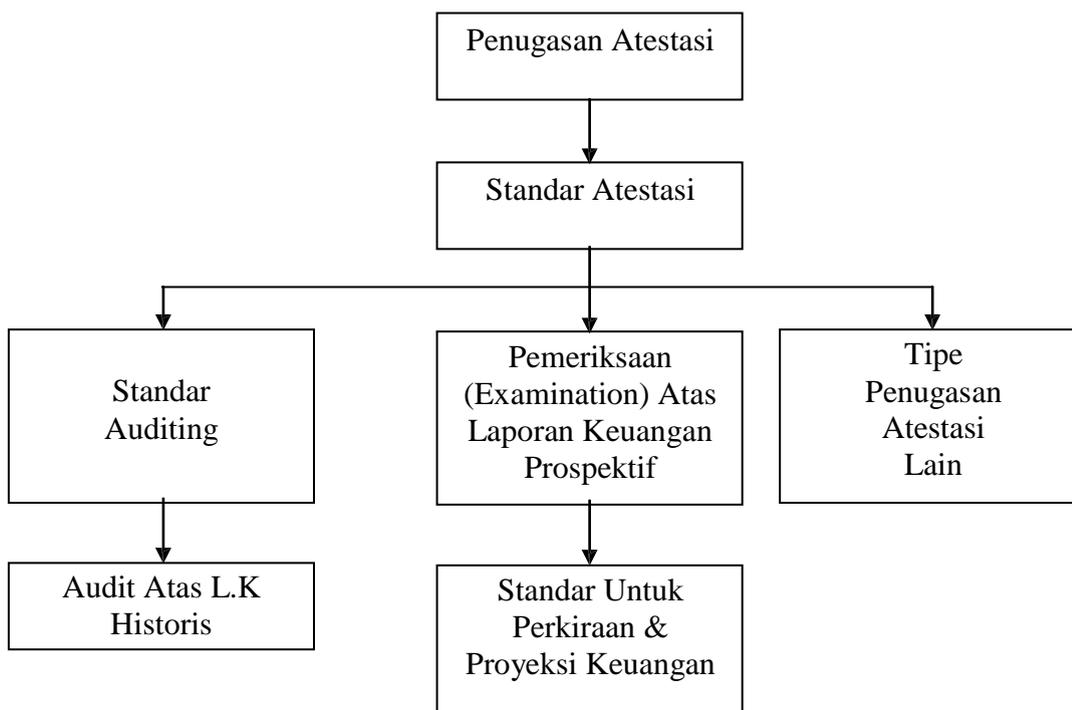
Pada umumnya kode etik akan mengandung sanksi-sanksi yang dikenakan pada pelanggar kode. Kasus-kasus pelanggaran akan dinilai dan ditindak oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu.

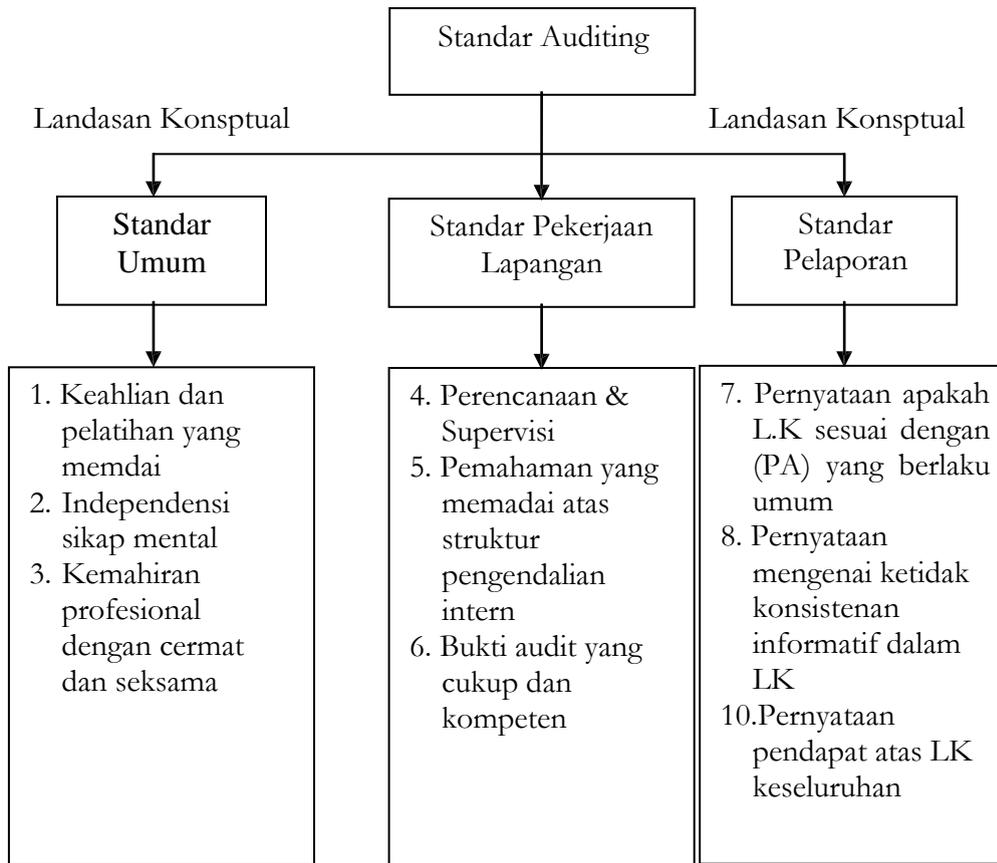
B. KODE ETIK AKUNTAN PUBLIK DALAM MENYIKAPI WINDOW DRESSING



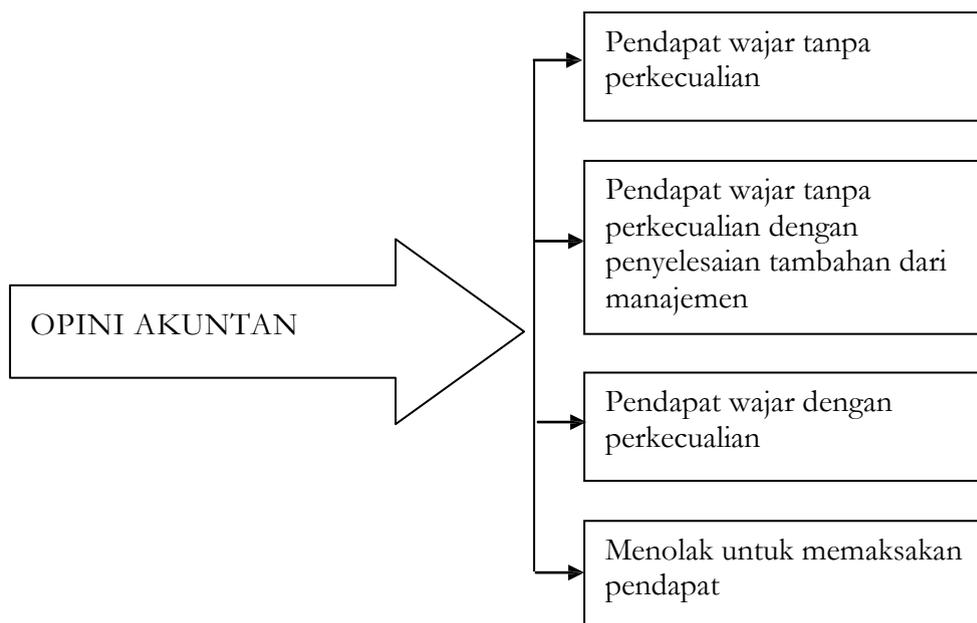
KODE ETIK AKUNTAN PUBLIK DALAM MENYIKAPI WINDOW DRESSING

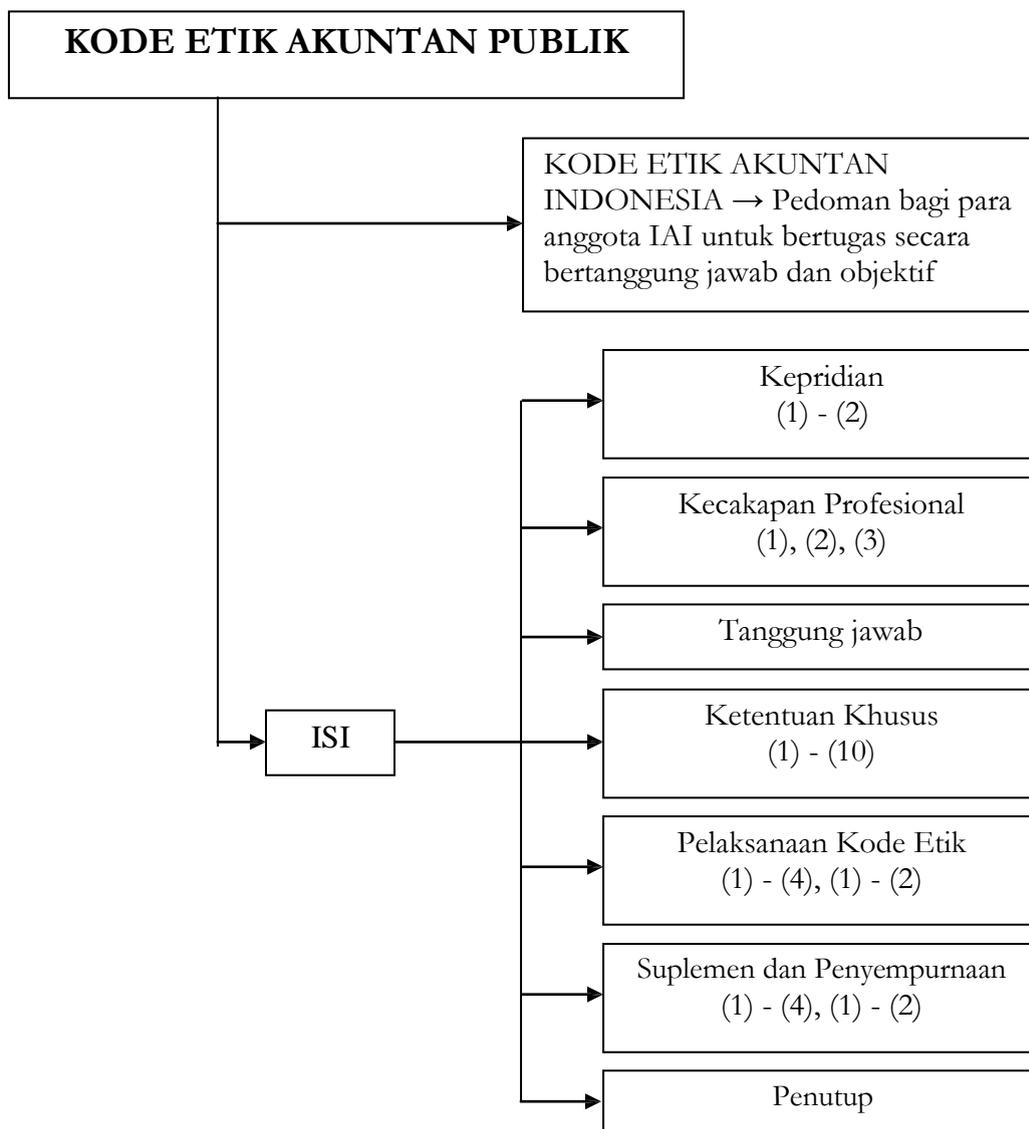
HUBUNGAN ANTARA STANDAR ATESTASI DENGAN STANDAR AUDITING





KODE ETIK AKUNTAN PUBLIK
DALAM MENYIKAPI WINDOW DRESSING





C. KESIMPULAN

Tingkat derajat akhlak yang tinggi dan memuaskan dalam etika dan integritas Akuntan Publik akan meningkatkan kredibilitas Akuntan Publik yang bersangkutan,

termasuk Kantor Akuntan Publik tempat dia bekerja. Menjadi sosok profesional yang bergengsi akan berdampak pada penghasilan yang tinggi bagi yang bersangkutan

DAFTAR PUSTAKA

Anthony, Robert N. and Reece, James S., *Accounting Principles*, Seventh Edition, Richard D. Irwin, Inc., Chicago, U.S.A: 1995.
 Ashton, David; Hopper, Trevor; and Scapens, Robert W., *Issues in Management Accounting*, Second Edition, Prentice Hall International (UK) Limited, Hertfordshire HP2 7EZ: 1995.

- Brigham, Eugene F., and Gapenski, Louis C., *Financial Management: Theory and Practice*, Sixth Edition, The Dryden Press, Fort Worth, TX 76107: 1991.
- Kaplan. Robert S. dan Norton, David P., *The Balance Scorecard: Translating Strategy Into Action*. Harvard Business School Press, Boston. Massachutertts: 1996.
- Weston, J. Fred, and Copeland; Thomas E., *Managerial Finance*, Eight Edition, CBS College Publishing, New York, NY 10017: 1986.

